

**PERAN KEPALA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH  
NEPANG ANTARA DESA ADOBALA DENGAN DESA REDONTENA DI  
KECAMATAN KLUBAGOLIT, ADONARA**

(Studi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur)

**Gede Dewangga Prahasta Dyatmika, Imam Kuswahyono, SH.MH,**

**M. Hamidi Masykur, SH.M.Kn**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: [prahastadewangga@gmail.com](mailto:prahastadewangga@gmail.com)

**Abstrak**

Sengketa tanah *Nepang* merupakan sengketa tanah Adat yang terjadi antara Desa Adobala dengan Desa Redontena di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Upaya hukum telah dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, akan tetapi penyelesaian sengketa tanah *Nepang* tidak dapat terselesaikan. Hukum Adat yang menyatakan bahwa membunuh merupakan cara untuk mencari kebenaran semakin menambah konflik di antara kedua desa dan menyebabkan perang tanding pada tahun 1982. Kepala Adat merupakan orang yang paling dihormati oleh masyarakat Adatnya dan dapat menyelesaikan sengketa Adat karena memahami hukum Adatnya. Berdasarkan hal itu diperlukan peran Kepala Adat untuk menyelesaikan sengketa tanah *Nepang* antara Desa Adobala dengan Desa Redontena.

Kata Kunci: Kepala Adat, Penyelesaian Sengketa, Tanah *Nepang*

**Abstract**

Land disputes *Nepang* an Indigenous land disputes that occur between the Adobala village with Redontena village in East Flores, East Nusa Tenggara. Legal efforts have been made by both parties to the dispute, but the settlement of land disputes can not be resolved *Nepang*. Customary law which states that killing is a way to search for the truth adds to the conflict between the two villages and causing a duel in 1982. Customary Chief is the most respected by the community customary and can resolve disputes as to understanding Indigenous customary law. Accordingly, it is necessary to resolve the role of Head of Indigenous land disputes *Nepang* between Adobala village with Redontena village.

Keywords: Role, Indigenous Head, Settlement, Land *Nepang*

## A. Pendahuluan

Tanah Adat kepunyaan masyarakat Adat diatur dalam hukum Adat mereka masing-masing. Tanah dipandang sebagai sesuatu yang sangat berharga dan harus dipertahankan oleh masyarakat Adatnya. Tanah Adat merupakan tanah milik dari kesatuan masyarakat hukum Adat. Sistem kepemilikan tanah menurut hukum Adat yang dapat dimiliki oleh warga pribumi dapat terjadi dengan cara:<sup>1</sup>

- a. Membuka hutan;
- b. Mewaris tanah;
- c. Menerima tanah karena pemberian, penukaran atau hibah;
- d. Daluwarsa/Verjaring.

Ada dua hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam hukum Adat, yaitu disebabkan :<sup>2</sup>

1. Karena sifatnya, yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga akan bersifat tetap dalam keadaannya bahkan kadang-kadang malahan menjadi lebih menguntungkan.
2. Karena faktanya, yaitu kenyataannya bahwa tanah itu adalah merupakan tempat tinggal persekutuan (masyarakat), memberikan penghidupan kepada persekutuan (masyarakat), merupakan tempat dimana para warga persekutuan (masyarakat) yang meninggal dunia dikuburkan, dan merupakan pula tempat tinggal bagi danyang-danyang pelindung persekutuan (masyarakat) dan roh-roh para leluhur persekutuan.

Di dalam masyarakat Flores Timur itu sendiri, tanah merupakan tempat untuk mencari penghasilan sehari-hari. Tanah dianggap sebagai harga diri dari masyarakat Adat tersebut. Oleh karena itu, tanah Adat sering menjadi objek sengketa antara masyarakat Adat. Masyarakat Adat akan berjuang hingga rela mengorbankan nyawa daripada menanggung malu karena kehilangan harga dirinya. Sengketa tanah Adat dapat menimbulkan tindak pidana yang berkepanjangan, seperti pembunuhan dan penyerangan antar desa. Penyelesaian

---

<sup>1</sup> Iman Sudiyat, **Hak Adat Sketsa Azas**, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm 3.

<sup>2</sup> Tolib Setiady, **Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)**, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm 311.

sengketa tanah Adat sering mengalami hambatan karena masyarakat Adat yang bersengketa memiliki hukum Adat yang berbeda mengenai tanah Adatnya.

Masyarakat Adat yang bersengketa umumnya memiliki hukum Adat yang berbeda yang sangat dipegang teguh oleh masyarakatnya, sehingga dapat mempersulit penyelesaian sengketa yang terjadi. Dalam pandangan antropologi, dimana saja ada manusia hidup bermasyarakat pasti ada sistem kontrol sosialnya. Menurut Hilman Hadikusuma, hukum Adat merupakan kontrol sosial dari masyarakat Adat dalam mengatur perilaku masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan dan agar penyimpangan yang terjadi dari norma-norma sosial yang telah ditentukan dapat diperbaiki.<sup>3</sup>

Salah satu sengketa tanah Adat yang masih terjadi di Indonesia saat ini adalah sengketa tanah Adat (*Nepang*) di Kecamatan Klubagolit Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur antara Desa Adobala dengan Desa Redontena. Konflik sengketa tanah *Nepang* ini sebagai akibat dari “Perang *Hinga*” pada tahun 1904, yaitu perang suku di Adonara untuk menguasai atau memperluas wilayahnya. Tanah *Nepang* memiliki luas 0,75 km<sup>2</sup> yang meliputi 19 (sembilan belas) bidang kebun.<sup>4</sup>

Warga dari kedua desa hingga saat ini saling mengklaim tanah sengketa di wilayah perbatasan yang kini menjadi kebun dan dikelola oleh warga dari dua desa tersebut. Sengketa tanah ini menyebabkan aksi saling membakar rumah dan perang tanding. Pada tahun 1982 pernah terjadi perang tanding antar warga desa tersebut dan menelan korban jiwa. Perang tanding merupakan perang antara suatu desa dengan desa lain untuk mencari kebenaran dari suatu sengketa, dimana pihak yang banyak jatuh korban menjadi pihak yang salah.<sup>5</sup>

Menurut masyarakat Adat di Pulau Adonara, bahwa pembunuhan (*tubak belo*) merupakan cara untuk mencari keadilan dan kebenaran. Jika hal itu terus berlanjut, tentunya akan merugikan masyarakat Adonara itu sendiri dan juga

---

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, **Antropologi Hukum Indonesia**, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm 8.

<sup>4</sup> Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 46/1964 PERDATA tanggal 22 Agustus 1964.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Yosep Lagadoni Herin tanggal 16 Juli 2014, di Larantuka.

merusak persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembunuhan juga semakin menambah konflik antara kedua desa yang bersengketa.

Dalam menghadapi kasus sengketa tanah *Nepang* diperlukan upaya dari Kepala Adat masing-masing untuk menyelesaikan sengketa agar tidak menimbulkan tindak pidana. Kepala Adat merupakan orang yang paling dihormati oleh masyarakat Adatnya dan dianggap dapat menyelesaikan sengketa Adat karena memahami hukum Adatnya.

Selain itu, di dalam pasal 103 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a yaitu penyelesaian sengketa Adat berdasarkan hukum Adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah.

Berdasarkan uraian diatas melalui penelitian, penulis mengkaji bagaimana Peran Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah *Nepang* Antara Desa Adobala Dengan Desa Redontena Di Kecamatan Klubagolit, Adonara.

## **B. MASALAH**

1. Bagaimana peran Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah *Nepang* antara Desa Adobala dengan Desa Redontena, di Kecamatan Klubagolit, Adonara?
2. Apa kendala serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah *Nepang* antara Desa Adobala dengan Desa Redontena di Kecamatan Klubagolit, Adonara?

## **C. PEMBAHASAN**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris digunakan karena penulis melakukan penelitian lapang ke tempat sengketa tanah *Nepang* untuk memperoleh informasi dan data yang menunjang hasil penelitian sehingga dapat menganalisis peran dan kendala Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah *Nepang* antara Desa Adobala dengan Desa Redontena di Kecamatan Klubagolit, Adonara.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis dan metode pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji keberlakuan norma-norma yang ada di masyarakat serta peran dari Kepala Adat dalam proses penyelesaian sengketa tanah *Nepang*. Sedangkan metode pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengetahui latar belakang masalah dan posisi kasus dari sengketa tanah *Nepang*.

Pembahasan dilakukan dengan cara menganalisis data yang didapat berdasarkan hasil wawancara, pengamatan langsung di tempat penelitian, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

## **1. Peran Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah *Nepang* dengan Menggunakan Hukum Adat dan Kebiasaan Masyarakat Setempat**

Hukum Adat merupakan kearifan lokal yang berpangkal pada keaslian budaya setempat dan merupakan warisan budaya leluhur yang adi luhung. Ada sejumlah nilai luhur mulia yang dapat diambil untuk menjadi pegangan hidup masyarakat yang meneruskan warisan budaya leluhur. Oleh karena itu, adapun peran yang dilakukan oleh Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah *Nepang* adalah:

### **a. Memimpin dan melakukan musyawarah dengan anggota keluarga dan masyarakatnya.**

Musyawarah ini bertujuan untuk mencari pokok permasalahan, hal-hal yang akan menimbulkan konflik, serta langkah-langkah yang akan diambil apabila menjadi konflik yang berkepanjangan. Musyawarah ini biasanya diselenggarakan di Balai Adat (*Orin Bele*). Pada tahap ini Kepala Adat menghimbau kepada masyarakatnya agar menahan diri sehingga tidak pecah konflik yang menimbulkan pertumpahan darah.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Adat Adobala dan Redontena tanggal 19 November 2014 di Adonara.

### **b.Melakukan Sumpah Adat.**

Sumpah Adat adalah sumpah yang didahului dengan ritual-ritual Adat yang dianggap sakral, dan apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan bencana atau jatuhnya korban. Bencana yang ditimbulkan biasanya tergantung perjanjian waktu mengucapkan sumpah, seperti wabah penyakit yang menyerang desa maupun hasil panen yang semakin menurun setiap tahunnya. Sumpah Adat biasanya didahului dengan “*Baulolong*”, yaitu menuangkan tuak ke tanah dengan maksud menghormati roh-roh leluhur. “*Baulolong*” juga mempunyai maksud agar para roh-roh leluhur ikut menyaksikan dan memberikan jalan pada saat proses Sumpah Adat.<sup>7</sup>

Sumpah Adat dilaksanakan pada tanggal 6 September 1982 dengan disaksikan oleh orang-orang dari Desa Hinga dan Desa Lambunga sekaligus membuat pernyataan perdamaian atau kerukunan antara masyarakat Desa Adobala dengan Desa Redontena.<sup>8</sup>

### **c. Mencetuskan dan Memimpin Perang.**

Perang merupakan wujud dari dilanggarnya Sumpah Adat dan Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian antara Desa Adobala dengan desa Redontena. Perang juga dimaksud untuk mengetahui kebenaran dari suatu konflik, dan wujud emosi masyarakat.

Di dalam masyarakat Flores Timur, dikenal ada 2 macam perang yaitu perang tanding dan perang Adat. Akan tetapi, seiringnya berjalan waktu perang tanding dan perang Adat terlihat hampir sama. Adapun perbedaan perang tanding dan perang Adat adalah perang Adat memiliki waktu istirahat sesuai dengan kesepakatan masing-masing Kepala Adat yang melakukan perang. Pada saat istirahat tidak diperkenankan untuk melakukan penyerangan, dan juga kedua belah pihak yang berperang bebas untuk masuk ke wilayah musuh untuk berbincang-bincang maupun hal lainnya yang bersifat kekeluargaan. Sedangkan

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Adat Adobala dan Kepala Adat Redontena tanggal 19 November 2014, di Adonara

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Adat Redontena Donbosco Doni Ola pada tanggal 19 November 2014. Di Desa Redontena.

perang tanding tidak memiliki jangka waktu penyerangan dan waktu istirahat, tergantung masing-masing pihak untuk selesai melakukan perang tanding.<sup>9</sup>

Adapun persamaan perang tanding dan perang Adat adalah:<sup>10</sup>

- a. Perang tanding dan perang Adat harus mendapat persetujuan dari Kepala Adat;
- b. Mempunyai tujuan untuk mencari kebenaran dan menjaga kewibawaan *Lewo Alape* (Tuan Tanah) yaitu Kepala Adat. Apabila salah satu pihak lari atau jatuh korban paling banyak berarti pihak tersebut yang salah;
- c. Dilarang untuk membunuh perempuan dan anak di bawah umur;
- d. Di dahului dengan ritual Adat seperti "*Baulolong*", yang bertujuan agar selalu dilindungi oleh para roh leluhur. Ritual Adat juga berfungsi untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk melakukan perang, dan siapa saja yang boleh ikut berperang.

Sebelum pergi berperang, orang-orang menghadap batu *Nubanara* dan berdoa (*amet*). Darah yang kelihatan melekat pada batu *Nubanara* merupakan tanda bahwa mereka harus pergi berperang. Sesudah itu para pejuang berkumpul di dekat batu-batu itu, membawa persembahan dan berdoa:

*"Inak amak bapak nenek* (Ibu Bapak serta Nenek Moyang)  
*Nepa goe pana kai* (sekarang saya pergi)  
*Seba wulung koli haeka* (mencari rezeki sayuran dan bahan makanan/musuh)  
*Moe molo goe doro* (berjalanlah di depan dan saya mengikutimu)  
*Beto mio di geng* (kelak kamu makan)  
*Kame di mekan* (kami juga makan)  
*Tekan bohu* (makan hingga kenyang)  
*Tenu seba uli kae"* ( dan terpuaskan sebagaimana sediakala)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa doa tersebut bermaksud agar para roh-roh leluhur selalu melindungi dan senantiasa memberikan

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Pewaris Kerajaan Larantuka Don Andre Marthinus Dva tanggal 26 November 2014, di Larantuka.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Pewaris Kerajaan Larantuka Don Andre Marthinus Dva tanggal 26 November 2014, di Larantuka.

keselamatan bagi mereka yang akan pergi ke medan perang. Selain itu, agar mereka bisa kembali ke rumah dengan keadaan selamat dan dapat berkumpul serta makan bersama keluarganya kembali.

Sengketa tanah *Nepang*, hingga saat ini telah jatuh korban sebanyak 4 (empat) orang. 2 (dua) korban dari Desa Adobala dan 2 (dua) korban dari Desa Redontena. Uniknya, jatuhnya korban dan terjadinya perang setiap 30 (tiga puluh) tahun sekali. Masyarakat dari kedua desa juga tidak mengetahui alasan kenapa perang terjadi setiap 30 (tiga puluh) tahun sekali. Insiden terakhir terjadi pada tanggal 1 (satu) Juli 2013 dan sebelumnya terjadi pada tahun 1983, dimana terjadi pembunuhan seorang warga Desa Redontena yang bernama Zainudin Gilo Miten secara sadis di sekitar lokasi konflik.

#### **d. Meminta keputusan Raja Adonara sebagai Penguasa atas seluruh tanah di Adonara**

Kepala Adat meminta keputusan Raja Adonara yang bernama Raja Arakian Kamba sebagai penguasa seluruh tanah di Adonara untuk menentukan kepemilikan tanah *Nepang*. Menurut masyarakat Desa Adobala dan Desa Redontena, Raja mengetahui sejarah dan kepemilikan tanah di Adonara. Hal ini juga karena masyarakat Desa Adobala dan Desa Redontena lebih percaya dan patuh terhadap Hukum Adat daripada Hukum Nasional. Akan tetapi, Raja Adonara terkesan tidak peduli dan sampai saat ini belum ada keputusan mengenai kepemilikan tanah *Nepang*. Selain itu, menurut Raja Don Andre Marthinus Dva, Raja Adonara Arakian Kamba kurang memanfaatkan lembaga adat yang dimiliki setiap Raja di Flores Timur. Lembaga Adat ini akan melakukan sidang Adat dan mengeluarkan keputusan setiap sengketa atau konflik Adat di wilayahnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa selama terjadinya sengketa tanah *Nepang* tidak ada peran dari Raja Adonara untuk menyelesaikan sengketa ini. Ini dibuktikan dengan tidak adanya fasilitasi dan keputusan yang dikeluarkan oleh Raja Adonara untuk menghentikan sengketa tanah *Nepang*. Untuk penyelesaian sengketa tanah *Nepang*, seharusnya Raja Adonara mengeluarkan keputusan melalui lembaga Adatnya serta ditambah



dengan dokumen-dokumen mengenai kepemilikan tanah di Adonara, sehingga hubungan kekeluargaan dan kekerabatan dapat terjalin kembali.

## **2. Peran Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah *Nepang* dengan Menggunakan Hukum Nasional**

Menggunakan hukum nasional dipilih karena upaya penyelesaian sengketa tanah *Nepang* menggunakan hukum Adat tidak berhasil. Apalagi hukum Adat di Adonara bahwa perang atau *tubak belo* (membunuh) merupakan cara untuk mencari kebenaran. Hukum Adat tentunya tidak berlebihan, karena masalah tanah adalah masalah hidup mati bagi orang-orang di Adonara. Tanah merupakan tempat untuk mencari penghasilan dan tempat mereka tinggal, apalagi mayoritas penduduk bekerja sebagai petani.

Menurut Kepala Adat Desa Redontena, Adat dapat mendamaikan kita dalam berbagai hal, akan tetapi hukum lah yang dapat mendamaikan Adat itu sendiri. Selain itu keputusan Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang kuat dan memperoleh perlindungan dari aparat keamanan yaitu POLRI dan TNI di dalam melaksanakannya. Sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik tentunya harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, Kepala Adat juga tidak menginginkan jatuhnya korban dan ingin agar hubungan kekerabatan serta kekeluargaan terjalin kembali.<sup>11</sup>

Upaya hukum untuk memperebutkan tanah *Nepang* antara masyarakat Desa Adobala dan Desa Redontena dilakukan pada bulan November tahun 1963, dimana Mean Boli Ama CS dari Desa Redontena menggugat ke Pengadilan Negeri Ende. Mean Boli Ama merupakan ayah dari Kepala Adat Desa Redontena, Bapak Don Bosco Doni Ola. Pada tanggal 22 (dua puluh dua) Agustus 1964, Pengadilan Negeri Ende dalam amar (*dictum*) putusannya menerima gugatan para penggugat untuk sebagian.

Akan tetapi Tergugat tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri Ende tertanggal 22 Agustus 1964. 15 (lima belas) tahun kemudian, pada tahun 1979

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Adat Redontena Don Bosco Doni Ola tanggal 19 November 2014, di Desa Redontena.

Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Kupang. Pengadilan Tinggi Kupang mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat-Terbanding tidak dapat diterima. Pihak Penggugat kemudian mengajukan permohonan kasasi, akan tetapi permohonan kasasi telah lewat waktu sehingga Mahkamah Agung pada tahun 1981 menyatakan permohonan kasasi dari Penggugat tidak dapat diterima.

Pada tahun 1982 Ketua Pengadilan Negeri Larantuka mengeluarkan Penetapan Nomor 46/1964/PDT/I tanggal 26 Mei 1982 dan Berita Acara Eksekusi dalam Perkara Nomor 46/1964/PDT tanggal 6 Juni 1982. Dengan dikeluarkannya Penetapan dan Berita Acara Eksekusi tersebut, justru menambah konflik baru yang berakibat pada bentrokan sehingga menimbulkan korban jiwa.

Amar putusan Pengadilan Negeri Ende adalah putusan yang bersifat deklarator karena hanya menyatakan tanah obyek sengketa milik para Penggugat. Sehingga putusan Pengadilan Negeri Ende tidak dapat dieksekusi karena tidak bersifat condemnatoir. Sehingga penetapan eksekusi yang pernah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka untuk melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Ende adalah penetapan tanpa dasar dan cacat hukum, sehingga batal demi hukum.

Selain itu menurut Pieter Hadjon, putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum bahwa perbaikan gugatan yang dilakukan Penggugat telah menyentuh substansi gugatan yang tidak dibenarkan oleh hukum acara perdata. Gugatan tidak dapat diterima pertimbangan hukumnya hanya menyangkut hal yang eksepsional bukan pokok perkara, dengan demikian pokok perkara tidak pernah diperiksa dan diputus. Upaya hukum dengan pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pihak Penggugat juga dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan kasasi telah lewat waktu.<sup>12</sup>

Berdasarkan putusan di atas, maka status obyek sengketa tanah *Nepang* kembali pada posisi semula sebelum adanya gugatan. Berdasarkan pasal 1865

---

<sup>12</sup> Pieter Hadjon, Juni 2014, **Sikap Mahkamah Agung RI, tentang Sengketa Tanah di Adonara**, Warta Flobamora, hlm 47.

KUH Perdata, siapa yang mendalilkan tentang suatu hak, maka dia harus membuktikan di Pengadilan. Sehingga pihak-pihak yang mendalilkan mempunyai hak atas objek sengketa tanah *Nepang* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, bukan dengan cara bertindak anarkis dan melawan hukum untuk merebut objek sengketa tanah *Nepang*.

Menurut Pieter Hadjon, untuk mengajukan gugatan kembali atas objek sengketa tanah *Nepang*, tidak bertentangan dengan azas *nebis in idem* yakni suatu perkara dengan objek yang sama dan Penggugat serta Tergugat yang sama tidak dapat disidangkan (diperiksa dan diputus) untuk kedua kalinya. Dalam perkara *a quo* pokok perkara belum pernah diperiksa dan diputus, maka dapat diajukan gugatan baru kepada Pengadilan.<sup>13</sup>

### **3. Kendala yang Dihadapi Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah *Nepang***

Upaya penyelesaian melalui hukum Adat dan Hukum Nasional telah dilakukan oleh Kepala Adat demi terselesaikannya sengketa tanah *Nepang*. Bahkan sudah setengah abad berperkara di Pengadilan, akan tetapi belum juga ada kepastian hukum yang menjamin. Karolus Kopong dalam tulisannya mengatakan bahwa kasus sengketa tanah *Nepang* merupakan suatu catatan hitam bagi dunia peradilan di Indonesia. Terlepas dari itu semua, kendala-kendala yang dihadapi hingga saat ini oleh Kepala Adat masing-masing desa yang bersengketa di dalam proses penyelesaian sengketa tanah *Nepang* adalah:

#### **a. Kedua belah pihak yang hanya menginginkan pengakuan hak milik atas objek sengketa tanah *Nepang***

Selama proses mediasi yang telah dilakukan, masing-masing pihak dari dua desa yang bersengketa hanya menginginkan pengakuan hak milik atas objek sengketa tanah *Nepang*. Kedua desa memiliki versi cerita yang berbeda mengenai kepemilikan tanah *Nepang* yang kini menjadi objek sengketa. Menurut Kepala

---

<sup>13</sup> Pieter Hadjon, Juni 2014, **Sikap Mahkamah Agung RI, tentang Sengketa Tanah di Adonara**, Warta Flobamora, hlm 47.

Adat Adobala Bapak Kasem Kopong Butu, bahwa tanah *Nepang* merupakan tanah milik Raja Adobala yang dulunya diberikan kepada warga desa Redontena untuk digarap. Sehingga ketika diminta kembali, maka warga desa Redontena berkewajiban mengembalikan tanah tersebut.<sup>14</sup>

Berdasarkan cerita Kepala Adat Redontena, bahwa tanah *Nepang* merupakan tanah warisan yang diperoleh dari leluhur secara turun temurun. Selain itu, warga desa Redontena telah menggarap tanah yang terdiri dari 19 bidang kebun tersebut sejak tahun 1904. Pengakuan hak milik terhadap tanah *Nepang* tentu tidak berlebihan, hal ini dikarenakan mayoritas mata pencaharian ke dua desa adalah bertani dan berkebun serta mereka menggantungkan hidup dengan cara berkebun dan bertani. Apalagi di masyarakat Adonara khususnya, perkara tanah adalah perkara hidup mati.<sup>15</sup>

**b. Hukum Adat yang menyatakan bahwa perang atau membunuh (*tubak belo*) merupakan salah satu jalan mencari kebenaran**

Dengan terjadinya perang tanding yang menimbulkan korban jiwa sebanyak 4 orang, menyebabkan kedua desa yang bersengketa menyimpan dendam yang sewaktu-waktu dapat menyebabkan terjadinya perang kembali. Hubungan kekeluargaan dan kekerabatan di antara kedua desa yang bersengketa menjadi renggang, sehingga selalu timbul kecurigaan dan kewaspadaan akan timbulnya serangan balasan.

Kebenaran yang dicari dengan cara membunuh (*tubak belo*) dan berperang merupakan kendala di dalam penyelesaian sengketa tanah *Nepang*, apalagi para pihak yang bersengketa berusaha agar korban yang jatuh semakin banyak sehingga jelas siapa pihak yang bersalah. Berperang atau *tubak belo* dilakukan juga oleh semua desa yang bersengketa di Adonara. Kepala Adat di kedua desa sudah mencegah terjadinya perang dan bentrokan fisik dengan meminta agar masyarakat menahan diri, akan tetapi provokasi-provokasi sering menimbulkan

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Adat Adobala Kasem Kopong Butu tanggal 19 November 2014, di Desa Adobala.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Adat Redontena Don Bosco Doni Ola tanggal 19 November 2014, di Desa Redontena.

emosi masyarakat yang berujung kepada penyerangan.<sup>16</sup> Selain itu, perang merupakan suatu kebiasaan yang tidak pernah bisa dihilangkan oleh masyarakat Adonara. Hal ini karena setiap orang yang lahir, pasti akan diwarisi ilmu berperang.

**c. Aparat Keamanan yang tidak tegas di dalam mengantisipasi dan mengatasi konflik sengketa tanah *Nepang***

Kepala Adat sangat menyayangkan sikap kurang tegasnya aparat keamanan di dalam menjaga perdamaian kedua desa yang bersengketa, sehingga mengakibatkan krisis kepercayaan terhadap aparat keamanan. Adapun hal-hal yang selama ini menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat kedua desa yang bersengketa terhadap aparat keamanan yaitu:<sup>17</sup>

- a. terbunuhnya saudara Zainudin Gilo Miten dari desa Redontena pada tanggal 1 Juli 2013 diluar lokasi sengketa dengan tubuh yang hancur termutilasi. Pada saat terjadi pembunuhan, aparat keamanan bersenjata dengan berpakaian intel berada di areal tanah sengketa, akan tetapi tidak mencegah pembunuhan yang dilakukan kepada saudara Zainudin Gilo Miten. Dengan cara dan sikap aparat yang seperti itu, mengakibatkan amukan massa Redontena terhadap aparat keamanan dan menutup jalan penghubung desa serta terputusnya jaringan PLN akibat tertimpa pohon kelapa;
- b. aparat keamanan yang tidak siap sewaktu-waktu di dalam mencegah hal-hal yang menyebabkan bentrokan fisik. Ini dibuktikan dengan tidak dicegahnya pembabatan, pembakaran dan pembersihan lahan di lokasi sengketa tanah *Nepang*. Padahal Pemerintah telah mengambil alih tanah tersebut, dan meminta agar masyarakat kedua desa yang bersengketa tidak melakukan aktifitas di dalamnya;
- c. pengambilan paksa senjata rakitan yang digunakan selama ini dalam bentrokan fisik yang dianggap berat sebelah dan tidak transparan. Menurut Kepala Adat

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Adat Redontena Don Bosco Doni Ola tanggal 19 November 2014, di Desa Redontena.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Adat Adobala dan Kepala Adat Redontena tanggal 19 November 2014, di Adonara.

kedua desa yang bersengketa, bahwa mereka akan menyerahkan seluruh senjata rakitan apabila pada proses penyerahan senjata rakitan dilihat secara bersama-sama. Apabila tidak demikian, mereka khawatir ada senjata rakitan yang tersisa yang digunakan sewaktu-waktu untuk menyerang kembali.

**d. Kurangnya perhatian Pemerintah dan DPRD Kabupaten Flores Timur terhadap sengketa tanah *Nepang***

Hingga saat ini, kurangnya perhatian oleh Pemerintah dan DPRD menyebabkan proses penyelesaian sengketa tanah *Nepang* menjadi kendala Kepala Adat untuk menyelesaikan sengketa tanah *Nepang*. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. kurangnya penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah kepada ke dua desa yang bersengketa. Desa Adobala pernah diberikan penyuluhan hukum sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi untuk desa Redontena belum pernah diberikan penyuluhan hukum hingga saat ini. Pemahaman hukum mempunyai peran penting agar masyarakat desa mematuhi hukum yang berlaku;
2. proses pertemuan yang dibuat secara terpisah antara warga desa Adobala dan Desa Redontena, menimbulkan kecurigaan di kedua desa yang bersengketa. Selain itu, kedua desa tidak mengetahui keinginan-keinginan yang disampaikan kepada Pemerintah;
3. DPRD hingga saat ini tidak pernah melakukan kunjungan lapangan untuk mendengar dan melihat langsung kondisi konflik/bencana yang sedang melanda masyarakatnya. Tidak adanya dukungan dari DPRD sehubungan proses hukum yang sedang atau akan dilakukan oleh kedua desa yang bersengketa. DPRD juga menyampaikan bahwa dukungan terhadap upaya hukum merupakan kewenangan pihak Pengadilan.

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Desa Adobala dan Kepala Desa Redontena tanggal 19 November 2014, di Adonara.

#### **4. Upaya Kepala Adat untuk Mengatasi Kendala yang Dihadapi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah *Nepang***

Upaya-upaya yang selama ini telah dilakukan oleh Kepala Adat untuk mengatasi kendala- kendala di atas yaitu sebagai berikut:

##### **a. Menghimbau dan melarang masyarakat untuk melakukan aktifitas di objek sengketa tanah *Nepang***

Dengan masing-masing pihak hanya menginginkan pengakuan atas hak milik, tentunya sewaktu-waktu akan timbul bentrokan fisik di objek sengketa tanah *Nepang*. Apalagi warga kedua desa setiap harinya melakukan aktifitas berkebun dan bertani di sekitar areal tanah *Nepang*.

Untuk mengatasi kendala ini, Kepala Adat Adobala mengupayakan agar tanah yang saat ini menjadi objek sengketa segera diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Namun pengambilalihan ini dengan syarat bahwa objek sengketa tanah *Nepang* harus dibangun sarana dan prasana untuk kepentingan bersama seluruh masyarakat Adonara, baik untuk Desa Adobala itu sendiri maupun Desa Redontena. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah sekolah, puskesmas dan pasar.

Kepala Adat Redontena untuk mengatasi kendala tersebut dengan cara melarang warga desa Redontena untuk masuk dan melakukan aktifitas di atas objek sengketa tanah *Nepang*. Hal ini untuk mencegah terjadinya bentrokan fisik yang menyebabkan jatuhnya korban. Selain itu Kepala Adat Redontena akan melakukan musyawarah dengan warganya agar tanah yang menjadi objek sengketa diberikan kepada Pemerintah untuk kepentingan pembangunan fasilitas umum dan agar diberikan imbalan jasa berupa ganti rugi.

##### **b. Menjalin kembali hubungan kekeluargaan dan kekerabatan melalui Perkawinan antara orang dari Desa Adobala dengan Desa Redontena**

Sejak terjadinya perang tanding yang mengakibatkan jatuhnya 4 (empat) korban jiwa, membuat kondisi hubungan kekeluargaan dan kekerabatan antara Desa Adobala dan Desa Redontena menjadi renggang. Sehingga warga kedua

desa menjadi takut untuk mengunjungi saudara atau kerabatnya, karena khawatir akan menjadi korban amukan massa.

Seiring berjalannya waktu, telah banyak warga dari Desa Adobala yang melangsungkan perkawinan dengan warga dari Desa Redontena dan begitu juga warga Desa Redontena yang melangsungkan perkawinan dengan warga dari Desa Adobala. Menurut Kepala Adat kedua desa, bahwa dengan perkawinan campuran antara kedua desa merupakan cara yang paling efektif sampai saat ini untuk mencegah timbulnya konflik kembali.

Dengan adanya perkawinan campuran, komunikasi dan hubungan kekeluargaan serta kekerabatan mulai terjalin kembali. Hal ini diperkuat apabila adanya suatu upacara kematian dan penobatan pemuka agama, maka warga kedua desa bergotong royong untuk melangsungkan upacara kematian dan penobatan pemuka agama.<sup>19</sup>

Suatu hal menarik dalam masalah tersebut, Kepala Adat Redontena berpesan kepada warganya dan warga Desa Adobala dengan bahasa Adatnya yang berbunyi sebagai berikut:<sup>20</sup>

*“Dai di mede dai (datang dengan mulus)  
Lau mai mede lau mai (pergi dengan mulus)  
Hanya jaga nuhut wiwak (asal jaga ucapan)”*

Arti dari ucapan Kepala Adat tersebut adalah pada saat datang untuk berkunjung akan mulus tanpa gangguan, begitu pula saat akan pergi pulang, asalkan tetap jaga perkataan sehingga tidak menyebabkan suatu ketersinggungan. Jadi Kepala Adat menjamin keamanan saat akan berkunjung dan pulang tanpa gangguan sama sekali, akan tetapi jangan berbicara sombong seperti sudah berani masuk ke Desa musuh tanpa ada yang berani untuk mengganggu.

Sedangkan untuk proses hukum, pihak Desa Redontena telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 14 Maret 2013 perihal Keberatan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor:

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Adat Redontena Don Bosco Doni Ola tanggal 19 November 2014, di Desa Redontena.

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala Adat Desa Redontena Bapak Don Bosco Doni Ola tanggal 19 November 2014, di Adonara.



46/1964/PDT/I tanggal 26 Mei 1982 dan Berita Acara Eksekusi dalam Perkara Perdata Nomor: 46/1964/Pdt tanggal 5 Juni 1982. Hal ini karena Penetapan dan Berita Acara Eksekusi dianggap sebagai sumber munculnya konflik baru.

**c. Menjalin komunikasi secara intensif terkait perkembangan kondisi masing-masing Desa kepada aparat keamanan TNI dan POLRI**

Setelah kejadian pembunuhan saudara Zainudin Gilo Miten, mengakibatkan menambah krisis kepercayaan terhadap aparat keamanan. Kepala Adat melalui Kepala Desa Redontena lalu mengirim surat kepada Kapolda Nusa Tenggara Timur agar mengambil alih semua proses keamanan dan ketertiban di atas tanah sengketa *Nepang*. Hal ini dikarenakan aparat POLRES Flores Timur sangat apatis dalam menangani persoalan ini. Hal ini langsung ditanggapi oleh Kapolda NTT dengan mengunjungi dan bertemu dengan kedua pihak yang bersengketa pada tanggal 25 November 2014.

Hal ini ditanggapi positif dan Kepala Adat akan terus memberikan informasi mengenai perkembangan situasi masing-masing Desa. Selain itu pihak TNI-AD melakukan kegiatan Bakti Karya dengan sasaran pemeliharaan dan perbaikan rumah ibadah, serta memberikan bantuan pengobatan gratis dan bantuan lainnya bagi masyarakat Desa Adobala dan Desa Redontena

**D. PENUTUP**

**1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Peran Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah *Nepang* adalah memimpin dan melakukan musyawarah dengan anggota keluarga dan masyarakat, melakukan sumpah Adat, mencetuskan dan memimpin perang, meminta keputusan Raja Adonara sebagai penguasa atas seluruh tanah di Adonara.
2. Adapun kendala-kendala yang dihadapi Kepala Adat dalam penyelesaian sengketa tanah *Nepang* hingga saat ini yaitu kedua belah pihak yang hanya

menginginkan pengakuan hak milik atas tanah *Nepang*, hukum Adat yang menyatakan bahwa perang atau membunuh (*Tubak Belo*) merupakan salah satu jalan mencari kebenaran, aparat Keamanan yang tidak tegas di dalam mengantisipasi dan mengatasi konflik sengketa tanah *Nepang*, dan kurangnya perhatian Pemerintah dan DPRD Kabupaten Flores Timur. Untuk itu, upaya Kepala Adat untuk mengatasi kendala di atas yaitu melarang masyarakat untuk melakukan aktifitas di tanah *Nepang*, menjalin kembali hubungan kekeluargaan dan kekerabatan melalui Perkawinan antara orang dari Desa Adobala dengan Desa Redontena, dan menjalin komunikasi secara intensif terkait perkembangan kondisi masing-masing Desa kepada aparat keamanan TNI dan POLRI.

## **2. Saran**

### **a. Untuk Masyarakat yang bersengketa.**

Sebaiknya warga masyarakat kedua Desa yang bersengketa tidak melakukan tindakan provokatif yang dapat menimbulkan bentrokan fisik. Tetap menahan diri, dan sebaiknya untuk tidak melakukan aktifitas di atas tanah sengketa. Hal ini karena selama proses bersengketa, bentrokan fisik yang menimbulkan korban terjadi karena adanya aksi provokasi-provokasi yang menimbulkan emosi. Selain itu, bentrokan fisik selalu terjadi di tanah *Nepang* dan sekitarnya. Harus sama-sama mengalah, dan lebih mengutamakan hubungan kekeluargaan dan kekerabatan.

### **b. Untuk Pemerintah Kabupaten Flores Timur**

Pemerintah beserta jajarannya agar terus selalu memfasilitasi penyelesaian sengketa dan lebih dekat terhadap kedua Desa yang bersengketa. Berikan pemahaman hukum yang sama tanpa dibeda-bedakan agar tidak timbul kecurigaan yang menyebabkan krisis kepercayaan terhadap Pemerintah. Sebaiknya tanah *Nepang* dikelola oleh Pemerintah untuk kepentingan kedua Desa yang bersengketa. Hal ini dapat diwujudkan dengan memberikan penyuluhan hukum, serta membuka dan memberikan lapangan pekerjaan baru agar yang dulunya menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian dan perkebunan dapat memiliki pekerjaan baru.

**c. Untuk Aparat TNI dan POLRI**

Untuk aparat TNI dan POLRI agar mengambil sikap tegas di dalam menangani konflik dan menjaga kedua Desa yang bersengketa. Setiap terjadi tindak pidana harus ditindak transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengambil paksa seluruh senjata rakitan yang ada di masing-masing Desa, dan memperlihatkan secara langsung kepada masyarakat. Semua ini agar tidak adanya kecurigaan bahwa senjata yang diambil tidak seluruhnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Hilman Hadikusuma, **Antropologi Hukum Indonesia**, PT Alumni, Bandung, 2006.

Iman Sudiyat, **Hak Adat Sketsa Azas**, Liberty, Yogyakarta, 1981.

Tolib Setiady, **Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)**, Alfabeta, Bandung, 2009.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

### KORAN

Pieter Hadjon, **Sikap Mahkamah Agung RI, tentang Sengketa Tanah di Adonara**, Warta Flobamora, Juni 2014.